

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A.P. Parlindungan, *Beberapa Masalah Dalam UUPA*, (Bandung: Mandar Maju, 2003).
- \_\_\_\_\_, *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, (Bandung: Mandar Maju, 1993).
- \_\_\_\_\_, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003).
- Adam Muhshi, *Teologi Konstitusi Hukum Hak Asasi Manusia Atas Kebebasan Beragama Di Indonesia*, (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2015).
- Adrian Sutedi, *Sertipikat Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Ahmad Sukadja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat yang Majemuk*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2009).
- Aidul Fitriadi Azhari, *Catatan Kritis Konstitusi Hukum Tata Negara, Politik, Hukum Islam*, (Solo: Pandiva Buku, 2009).
- Arie S. Hutagalung, *et.al., Hukum Pertanahan Di Belanda Dan Indonesia*, (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012).
- Bagir Manan, *et al., Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Bandung: Yayasan Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Supremasi Hukum, 2001).
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).
- Bha'iq Roza Rakhmatullah, *Perlindungan Hukum Dan Keadilan Dalam Musyawarah Ganti Rugi Pengadaan Tanah*, (Bojong: Nasya Expanding Management, 2023).
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Djambatan, 2007).

- Budy Munawar Rachman, *Membela Kebebasan Beragama: Percakapan Tentang Sekularisme, Leberalisme, dan Pluralisme*, (Jakarta: Lembaga Study Agama dan Filsafat, 2010).
- CST. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Sekitar HAM Dewasa Ini*, (Jakarta: Djambatan, 2003).
- Gokkel. HRW dan Van der Wall, *Istilah Hukum Lain-Indonesia*, alih bahasa S. Adiwinata, (Jakarta: Intermedia, 1986).
- Imron Chumaidi, *Panduan Kepemilikan Tanah: Problematika Sertifikasi Tanah Secara Sporadik*, (Semarang: Lawwana, 2022), hal. 3.
- Irma Devita Purnamasari, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer: Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Mengatasi Masalah Hukum Pertanahan*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2010), hal. 2.
- Leo Suryadinta, *Penduduk Indonnesia: Etnis dan Agama dalam Era Perubahan Politik*, (Jakarta: LP3ES, 2005).
- M. Citra Ramadhan, *Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Rumah Makan Yang Ditinjau Dari UU No.30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang*, (Medan: Merdeka Kreasi Group, 2020).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 47.
- Sigit Sapto Nugroho dan I Wayan Kartika Jaya Utama, *Pokok-Pokok Hukum Agraria Indonesia*, (Klaten: Lakeisha, 2022).
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali, 1986).
- Sudjanto Suidiana, *Konkuren Dalam Kepailitan Dan Penyelesaian Serta Akibat Hukum Kepailitan*, (Bogor: Allsys Media Solusi, 2023), hal. 85.
- Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, (Jakarta: Prenadamedia, 2015).
- Waskito dan Hadi Arnowo, *Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2019).
- Weinata Sairin, *Visi Gereja Memasuki Milenium Baru: Bunga Rampai Pemikiran*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002).
- Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, (Bandung, Tarsito, 1994).

## B. Jurnal

- Bayani, "Problematika Pendirian Rumah Ibadat Umat Minoritas di Kalimantan Selatan", *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 21, No. 1, Juni 2022.
- Christilia Elvira Mononut, "Pemindahan Hak Milik Atas Tanah Hasil Lelang Menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. V, No. 6, Agustus 2016.
- Dwi Heny Ratnawati dan Djauhari, "Pelaksanaan Akta Pelepasan Hak Sebagai Alas Hak Untuk Mengajukan Permohonan Peralihan Dan Perubahan Hak Guna Bangunan Yang Jangka Waktunya Telah Berakhir Di Kabupaten Brebes", *Jurnal Akta*, Vol. 5, No. 1, Maret 2018.
- Fatmawati, "Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama Dan Beribadah Dalam Negara Hukum Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8, No. 4, Agustus 2011.
- Gunanegara, "Kekuatan Hukum Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebagai Alas Hak Pengurusan Hak Atas Tanah", *Jurnal Law Review*, Vol. XXI, No. 3, Maret 2022.
- Ismardi, "Pendirian Rumah Ibadat Menurut Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 8 dan 9 Tahun 2006, *Jurnal Toleransi*", *Jurnal Toleransi*, Vol. 3, No. 2, 2011.
- Niken Ariska Handayani, *et.al.*, "Akibat Hukum Pendaftaran Tanah Pertama Kali Tanpa Alas Hak Yang Sah", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 8, No. 3, 2019.
- Rini Fidiyani, "Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia (Belajar Keharomonisan Dan Toleransi Umat Beragama Di Desa Cikakak, Kec. Wangon, Kab. Banyumas)", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13, No. 3, September 2013.
- Urip Santoso, "Eksistensi Hak Pengelolaan Dalam Hukum Tanah Nasional", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 24, No. 2, Juni 2012.
- Vanessa Virgonia, *et.al.*, "Hak Menguasai Dari Desa Atas Tanah, Hak-Hak Individual Atas Tanah, Konversi Hak Atas Tanah Swapraja", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 1, No. 6, 2020.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah;

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006, dan Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah.

### D. Web

Admin, “Perlindungan Terhadap Kebebasan Beragama”, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11505>, diakses pada tanggal 15 Mei 2023 pukul 18.40 WIB.

Erik. S, “Pembangunan Gereja HKBP di Cilegon Ditolak, Warga Dasarkan Pada SK Bupati Tahun 1975”, <https://www.tribunnews.com/regional/2022/09/09/pembangunan-gereja-hkbp-di-cilegon-ditolak-warga-dasarkan-pada-sk-bupati-tahun-1975>, diakses pada tanggal 11 April 2023 pukul 14.07 WIB.

Gunanegara, “Pemberian Hak Atas Tanah Di Kawasan Lindung Menurut Surat Edaran ATR/BPN No. 4/2022 versus Undang-Undang Sektoral”, <https://www.researchgate.net/publication/360768603>, diakses pada 28 Maret 2023.

Monica Noviola, “Rencana Detail Pembangunan Gereja HKBP di Kota Cilegon”, <https://www.kompas.com/properti/read/2022/09/20/130000621/rencana>

-detail-pembangunan-gereja-hkbp-di-kota-cilegon?page=all, diakses pada tanggal 11 April 2023 pukul 13.52 WIB.

Rasyid Ridho, “Penolakan Gereja di Cilegon, Kemenag: SK Bupati Tahun 1975 Sudah Tidak Relevan”, <https://regional.kompas.com/read/2022/09/08/221916378/penolakan-gereja-di-cilegon-kemenag-sk-bupati-tahun-1975-sudah-tidak?page=all>, diakses pada tanggal 14 Juli 2023 pukul 20.13 WIB.

